

Bandung dan Kehidupan Intelektual

PR 4 Mei 05 Oleh AJIP ROSIDI

BARU-BARU ini saya diminta oleh DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) untuk menjadi anggota juri lomba penulisan kritik seni DKJ 2004. Saya membaca karangan-karangan yang diikutsertakan dalam lomba tersebut dengan perasaan kagum dan kaget. Kagum karena tidak mengira bahwa jumlah penulis kritik seni rupa jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan dengan keadaan kurang lebih seperempat abad yang lalu. Ada 38 buah karangan yang masuk, tetapi karena ada beberapa orang yang mengirimkan lebih dari satu karangan, jumlah penulisnya hanya ukuran orang. Jumlah itu pun tak dapat saya bayangkan pada tahun 1970-an, ketika penulis kritik seni rupa bisa dihitung dengan sebelah jari tangan, yaitu Saninto Juliman, Jim Supangkat, Sudarmadji dan Agus Dermawan T.

Penulis kritik seni rupa selama itu memang tidak pernah banyak. Yang pertama menulis kritik seni rupa di Indonesia dalam bahasa Belanda dan Indonesia adalah Sudjojono pada masa sebelum perang. Pada masa revolusi beliau memimpin majalah *Seniman* yang terbit di Solo dan sempat menerbitkan kumpulan tulisannya tentang seni rupa menjadi buku.

Pada tahun 1950-an, Trisno Sumardjo (Jakarta), Sudjoko dan Popo Iskandar (Bandung) dan Kusnadi (Yogyakarta) muncul sebagai penulis tentang seni rupa. Tetapi tulisan mereka tidak banyak karena pameran seni rupanya pun jarang diadakan dan umumnya tulisannya bersifat kritik impresif. Oesman Iffindi dan Basuki Resobowo juga banyak membahas tentang seni ru-

pa, tetapi tidak bersifat kritik.

Tentu saja melihat jumlah penulis kritik seni rupa naik berlipat saya merasa gembira. Tapi perasaan gembira itu bukan hanya karena jumlahnya, melainkan juga karena umumnya tulisan-tulisan yang diikutkan ke dalam lomba itu mutunya sangat baik. Tulisan-tulisan itu membuktikan bahwa penulisnya tidak hanya tahu tentang seni rupa, melainkan juga mengikuti teori-teori ilmu budaya dengan baik, di samping juga membaca buku-buku tentang filsafat, sastra dan lain-lain. Pendeknya dari karangan-karangan itu kelihatan keluasan pandangan para penulisnya.

Perasaan kaget saya disebabkan dari sekian likur peserta itu tak satu pun yang datang dari Bandung. Yang paling banyak dari Yogyakarta, kemudian dari Jabotabek. Ada juga dari Bali. Saya kaget karena di Bandung ada FSR & DITB, ada Fakultas Bahasa dan Seni UPI. Memang di sekolah seni rupa kita tidak diajarkan penulisan kritik seni (mengapa?), namun wajarlah kalau saya mengharapakan akan muncul juga penulis kritik seni rupa dari Bandung dalam lomba penulisan kritik seni yang diselenggarakan oleh DKJ secara nasional.

Apakah pengumuman tentang lomba itu tidak sampai ke Bandung? Rasanya hal itu mustahil. Menurut pihak DKJ sendiri, mereka mengirimkannya ke alamat-alamat di Bandung. Apakah jumlah hadiahnya kurang menarik? Hal itu bersifat relatif, tapi untuk pemenang hadiah I disediakan Rp 7 juta, untuk hadiah II disediakan Rp 5 juta dan

untuk hadiah III disediakan Rp 3 juta. Dibandingkan dengan lombalomba penulisan lain yang panjangnya hanya beberapa halaman, besarnya hadiah itu tak bisa digolongkan kecil. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan oleh orang-orang Bandung jumlah itu memang dianggap kecil.

Namun setelah dicermati, ternyata setelah Sanento Juliman dan Popo Iskandar meninggal dan Jim Supangkat lebih sibuk sebagai kurator, di Bandung hanya Maman Noor yang menulis kritik seni rupa. Dan ia pun belakangan tampaknya lebih sibuk sebagai kurator pameran. Bagi orang setingkat Maman Noor tidak mustahil lomba menulis kritik seni rupa DKJ itu tidak menarik.

Tapi itu juga menunjukkan bahwa setelah Maman Noor tidak tumbuh penulis kritik seni rupa yang lebih muda. Artinya di Bandung tidak terjadi regenerasi alias tidak ada kaderisasi. Dan kalau kita perhatikan bidang-bidang yang lain, maka kita pun akan melihat di hampir segala bidang tidak tampak regenerasi atau kaderisasi. Dalam bidang hukum setelah angkatan Mochtar Kusuma-Atmadja dan Sri Sumantri, tidak tampak yang muda muncul. Dalam bidang sosial-politik, tidak ada yang memperlihatkan wawasan yang muncul -- atau kalau pun ada tidak sampai menembus ke gelanggang nasional seperti Herman Ibrahim dan Setia Permana yang banyak mengemukakan pikirannya dalam surat kabar lokal.

Dari ITB yang pada tahun 1965-1966 ketika mahasiswa berontak menjatuhkan Presiden Soekarno banyak melahirkan politisi -- yang sayang kebanyakan kemudian terjebak dalam permainan-penguasa-

tunggal Soeharto dengan Golkarnya -- pada masa reformasi (1997-1998) tidak ada yang muncul. Tulisan-tulisan yang pada tahun 1965-1966 banyak dibuat oleh para mahasiswa (Aldy Anwar, Alex Rumondor dll) dan para mahaguru (a.l. Otong Kosasih, M.T. Zen) yang memberikan arah dan pencerahan terhadap perjuangan para mahasiswa dan para pelajar (KAMI dan KAP-PI), pada masa reformasi tidak tampak. Tulisan-tulisan dan pandangan yang jernih malah lebih banyak dikemukakan oleh orang-orang Yogyakarta (Amien Rais, Ihlusul Amal, dll.) dan Semarang (Satjipto Rahardjo, Muladi, dll.).

Kian bertambahnya universitas dan perguruan tinggi di Bandung khususnya di Jawa Barat umumnya, tidak mendorong meningkatnya kualitas intelektualitas sarjana yang dihasilkannya. Yang marak menjadi berita nasional malah masalah kekerasan yang dipraktikkan di STPDN Jatininggar sampai ada korban yang meninggal dan cacat. Universitas dan perguruan tinggi di Bandung dan Jawa Barat umumnya seakan-akan hanya berlomba memproduksi pegawai atau usahawan yang mengejar keuntungan materi belaka. Sepertinya tidak ada yang tertarik untuk memilih hidup yang penuh idealisme.

Keadaan seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan berubah. Pemerintah daerah yang seharusnya memberikan arah kepada perkembangan masyarakat tidak tampak usahanya ke arah itu. Bahkan sejak lama kita menyaksikan bahwa Pemda Jawa Barat tidak memanfaatkan universitas yang ada di daerahnya untuk

diajak bersama-sama membangun daerah. Lulusan ITB misalnya lebih banyak digunakan oleh Pemda DKI Jakarta dan pemerintah pusat daripada oleh pemerintah Jawa Barat.

Berlainan dengan Pemda Yogyakarta yang merasa bangga dan memanfaatkan secara maksimal para sarjana lulusan UGM, UII dan perguruan tinggi lain yang terdapat di sana untuk diajak membangun daerahnya. Demikian juga Pemda Semarang yang banyak memanfaatkan tenaga-tenaga yang berasal dari Universitas Diponegoro dll.

Yang perlu diperhatikan ialah bahwa di Yogya tumbuh penerbit-penerbit yang aktif dalam menerbitkan buku-buku yang bersifat pemikiran, baik dalam bidang sosial-politik, filsafat, agama, teori-budaya, kesenian, dll. Konon jumlahnya lebih dari seratus. Mereka seakan berlomba menerbitkan buku baik asli maupun terjemahan. Banyak yang mengeluh karena terjemahannya sangat buruk, namun hal itu tidak menutup kenyataan bahwa terjemahan yang buruk pun dapat juga merangsang pembacanya untuk mengetahui lebih banyak.

Aktivitas kesenian dan budaya seperti pameran seni rupa dan lainnya, pementasan teater, pembacaan sajak dan cerita pendek, diskusi dan seminar, lebih marak di Yogyakarta daripada di Bandung. Kegiatan kesenian tersebut memberi kesempatan bertemunya para peminat budaya dan seni untuk saling mengenal, untuk berdialog, untuk bertukar pandangan, melalui pembicaraan informal sambil makan-makan atau minum-minum. Kegiatan demikian sangat kurang di Bandung. Para seniman dan para akademisi mau bertemu dengan kawan akrabnya

saja, sehingga terjadilah pengelompokan yang tidak produktif.

Di Bandung juga banyak penerbit buku. Menurut keterangan anggota Ikapi Jawa Barat jumlahnya lebih dari 140. Tetapi kebanyakan adalah penerbit buku-buku pelajaran yang orientasinya ke arah proyek pembelian oleh pemerintah belaka. Jumlah penerbit yang mengeluarkan buku-buku umum yang bersifat pemikiran sedikit sekali jumlahnya, antaranya Mizan, Pustaka, Nuansa, Kiblat dan satu dua lagi.

Banyaknya kegiatan kesenian serta ilmiah, mendorong maraknya penerbitan buku yang bersifat pemikiran dan pada gilirannya maraknya penerbitan buku yang merangsang pemikiran merupakan lahan yang subur untuk terbinanya lingkungan dan tumbuhnya kehidupan intelektual dan budaya dalam masyarakat. Hal itu terbukti dalam kasus Yogyakarta.

Kalau kegiatan seni dan ilmiah tidak didorong hidupnya di Bandung, demikian pula kalau kegiatan penerbitan buku hanya terbatas kepada buku-buku ajar untuk mengejar proyek-proyek pemerintah pusat dan pemda apalagi kalau dengan melakukan KKN, maka kehidupan intelektual di Bandung akan kian jauh tertinggal oleh Yogyakarta dan mungkin juga oleh kota lainnya.

Keadaan ini akan berlarut-larut terus kalau tidak segera disadari oleh orang Bandung sendiri. Merekalah yang harus mencari jalan keluarnya agar Bandung yang dahulu menjadi kota kedua dalam kegiatan intelektual, kegiatan penerbitan buku dan pemikiran setelah Jakarta, agar merebut tempatnya kembali.***

Penulis, budayawan.